

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara dalam membiayai pengeluaran negara baik rutin maupun pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah dapat menjalankan program-programnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya. Untuk dapat melaksanakan program tersebut pemerintah membutuhkan dana dalam bentuk penerimaan negara.

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak bukanlah sebagai iuran sukarela tetapi sebuah tarikan hasil kekayaan masyarakat secara paksaan sehingga dalam membayar pajak, wajib pajak harus bisa mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku (Adisamartha dan Noviri, 2015). Sumber pajak di Indonesia berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan. Untuk Badan Usaha sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa :

“Subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 4 perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya.”

Saat ini, Indonesia telah membentuk sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak bebas menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya. Wajib pajak mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Sistem pemungutan pajak ini dikenal dengan sistem *self-assessment*. Dalam penerapan sistem ini, mengharuskan wajib pajak untuk berperilaku jujur dalam melaporkan kewajiban pajaknya guna tercipta kesesuaian antara pembayaran pajak dengan kewajiban pajak sesungguhnya (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Berdasarkan dari data yang dilampirkan dalam *website* resmi Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) selama periode 2016-2018 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan. Secara berturut-turut, persentase pencapaian realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016 sebesar 83,1%, 2017 sebesar 81,2%, dan 2018 sebesar 78,8%. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa realisasi penerimaan pajak terus menurun, sehingga menyebabkan sumber penerimaan negara dari sektor pajak berkurang. Ini menandakan bahwa ada hal-hal yang bisa wajib pajak lakukan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar.

Pemerintah Indonesia terus berupaya memaksimalkan penerimaan pajak negara untuk mencapai target sesuai APBN yang telah dibuat. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai pembayar pajak. Perusahaan yang menjadi wajib pajak badan memiliki kewajiban perpajakan. Semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Perusahaan selalu berusaha untuk memaksimalkan laba dengan mengefisienkan beban. Termasuk pajak, karena biaya ini termasuk dalam biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Untuk itu, perusahaan melakukan strategi meminimalisasi beban pajak.

Kurangnya kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak tentang pentingnya peran pajak serta kecenderungan keengganan membayar pajak ketika memperoleh penghasilan dapat menimbulkan tindakan agresif seperti penghindaran pajak. Agresivitas pajak diartikan sebagai perilaku manajerial yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan membuat beban pajak yang diperoleh lebih rendah dari jumlah yang sebenarnya. Agresivitas pajak terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pelaku usaha sebagai pembayar pajak dan pemerintah.

Penelitian mengenai agresivitas pajak telah beberapa kali dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai semua upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menurunkan jumlah beban pajak dari yang seharusnya dibayar oleh perusahaan (Lanis dan Richardson, 2012). Menurut Frank et al., (2009) dalam Suyanto dan Supramono (2012) agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan baik dengan cara yang legal (*tax avoidance*) maupun dengan cara ilegal (*tax evasion*). Menurut Nugraha dan Meiranto (2015) agresivitas pajak adalah kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. *Tax planning* adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki (Kuriyah dan Asyik, 2016). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari agresivitas pajak adalah untuk mengurangi beban yang ditanggung.

Contoh kasus yang terjadi di Indonesia terkait kasus manipulasi pajak seperti PT. Coca Cola Indonesia yang diduga melakukan penggelapan pajak mengakibatkan kurang bayar Rp 49,24 miliar. Berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak, diketahui bahwa perusahaan telah mengalami kenaikan biaya yang cukup signifikan di dalam perusahaan sehingga dilakukan tindakan penghindaran pajak yang berakibat pada pengurangan pembayaran pajak. Pengeluaran yang besar mengakibatkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga pembayaran

pajak pun berkurang. Biaya tersebut termasuk iklan dari tahun 2010-2013 dengan total nilai Rp 566,84 miliar yang mengakibatkan penurunan penghasilan kena pajak (kompas.com).

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak. Pertama yaitu *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan bentuk dari tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Pengungkapan CSR adalah kewajiban bagi setiap perusahaan yang diatur oleh pemerintah dalam UU RI No. 40 tahun 2007 pasal 74 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. CSR mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya. Penerapan CSR dapat berdampak positif bagi perusahaan dalam kegiatannya terhadap masyarakat, karena merupakan bentuk partisipasi dan kepedulian perusahaan terhadap tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin rendah agresivitas pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan Nurcahyono dan Kristiana (2019), Setyoningrum dan Zulaikha (2019) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Profitabilitas adalah suatu usaha perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Besarnya pendapatan yang diperoleh perusahaan tentu mempengaruhi jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Prastowo & Juliaty (2008 : 84) menyatakan bahwa informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan, sehingga dapat memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas) serta untuk merumuskan perubahan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya. Menurut Leksono et al. (2019) perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, tidak akan melakukan agresivitas pajak. Sedangkan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah, akan

melakukan agresivitas pajak karena perusahaan lebih baik mempertahankan aset yang dimilikinya. Penelitian tentang pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pernah dilakukan oleh Leksono et al. (2019) penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Menurut Andhari dan Sukartha (2017) *capital intensity* merupakan perusahaan yang menyimpan investasinya dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity* sangat berhubungan dengan investasi perusahaan dalam aset tetap yang menjadikan beban depresiasi aset tetap semakin meningkat. *Capital intensity* dapat dikatakan bahwa perusahaan akan rela berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi perusahaan demi mendapatkan laba (Nugraha dan Meiranto, 2015). Aset tetap memiliki umur ekonomis yang akan menimbulkan beban penyusutan (depresiasi) setiap tahunnya (Nugraha dan Meiranto, 2015). Menurut penelitian Andhari & Sukartha (2017) jika semakin besar perusahaan berinvestasi pada aset tetap, maka semakin besar perusahaan akan menanggung beban penyusutan (depresiasi) Hal ini akan memberikan dampak terhadap laba perusahaan yang semakin menurun, sehingga pajak terutang perusahaan juga akan semakin menurun. Oleh karena itu, semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka semakin tinggi agresivitas pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Indradi (2018), Simamora dan Rahayu, (2020) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Octaviani dan Sofie (2019) menyatakan bahwa *capital intensity ratio* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan kemampuan finansial dari perusahaan tersebut. Menurut Mindra dan Erawati (2014) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar

kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung resiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki sebuah perusahaan maka dikategorikan sebagai perusahaan besar. Sebaliknya, semakin kecil aset yang dimiliki sebuah perusahaan maka dikategorikan sebagai perusahaan kecil. Perusahaan besar dinilai dapat mengelola pajak dengan optimal. Dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut dapat memudahkannya dalam mengelola pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Leksono et al. (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Hal terakhir yang dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak yaitu, *financial distress*. *Financial distress* atau kesulitan keuangan juga menjadi salah satu faktor penyebab agresivitas pajak. *Financial distress* adalah kondisi perusahaan yang kesulitan keuangan dimana dalam kondisi ini perusahaan memiliki utang yang tinggi, namun perusahaan masih bisa menjalankan kegiatan operasionalnya (Richardson et al., 2015a). *Financial distress* dianggap mempengaruhi tingkat agresivitas pajak dikarenakan pada saat perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan maka tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak perusahaan yaitu dengan meminimalkan beban pajak melalui agresivitas pajak. Perusahaan yang mengalami kondisi kesulitan keuangan akan lebih meningkatkan tindakan agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Octaviani & Sofie (2019) menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya peneliti melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Capital Intensity* dan *Financial Distress* terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mencari bukti empiris pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.
2. Mencari bukti empiris pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
3. Mencari bukti empiris *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
4. Mencari bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
5. Mencari bukti empiris pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi penulis, dapat digunakan sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi dalam pengaruh *corporate social responsibility*, profitabilitas, *capital intensity*, ukuran perusahaan dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak. Sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang.
2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini akan memberikan bukti empiris atas pengaruh *corporate social responsibility*, profitabilitas, *capital intensity*, ukuran perusahaan dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak. Sehingga diharapkan memberikan dorongan untuk melakukan penelitian-penelitian lanjutan yang lebih baik dan melengkapi penelitian yang telah ada.
3. Bagi praktisi, dapat digunakan sebagai acuan dalam mencermati pengaruh *corporate social responsibility*, profitabilitas, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak serta dapat dijadikan salah satu sumber referensi untuk penelitian mendatang.
4. Bagi direktorat pajak, dapat digunakan sebagai pandangan dalam pengambilan kebijakan perpajakan di masa yang akan datang.
5. Bagi perusahaan, dapat digunakan sebagai pandangan bagi perusahaan mengenai tindakan agresivitas pajak agar terhindar dari tindakan tersebut dan tidak terkena sanksi perpajakan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan agar dalam penulisan skripsi menjadi sistematis dan relevan. Skripsi ini terbagi dalam lima bab dan terdapat sub bab di dalamnya sebagai rinciannya. Sistematika skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penulisan makalah dilakukan penelitian ini, perumusan masalah yang berisi pernyataan tentang bagaimana keadaan fenomena dari latar belakang yang memerlukan jawaban dari penelitian ini, tujuan penelitian ini menjelaskan tentang tujuannya dilakukan penelitian, manfaat penelitian menjelaskan tentang

manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH TEORI

Bab ini membahas uraian mengenai tinjauan teori (literature) secara lengkap yang akan menjadi dasar teori penelitian yang akan diteliti dan sebagai dasar analisis yang diambil dari berbagai literatur.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas uraian mengenai rancangan penelitian yang akan dilakukan variabel dan pengukurannya, sampel penelitian, dan metodologi penentuan sampel, metode dan prosedur pengumpulan data dan metode yang digunakan untuk analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian serta analisis data dan pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penutup dari keseluruhan isi skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dari hasil pembahasan dan keterbatasan penyusunan serta saran untuk penelitian yang diharapkan dapat berguna untuk memperbaiki kekurangan yang ada.